



Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Tiang Hak Asasi Manusia di Papua

Ode Jamal¹, Marthen Timisela²

^{1,2} Universitas Cendrawasih, Indonesia

Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

Email : ¹odejamal00@gmail.com ²timiselamarthen56@gmail.com

Abstract Civic education is a crucial element in realizing responsible citizenship. In Papua, where there is cultural diversity and complex socio-political challenges, the development of human rights is often hampered. In this context, civic education serves as a foundation that can strengthen understanding and respect for human rights. This article aims to examine the significance of civic education in Papua, emphasizing its impact on human rights awareness and community participation. The research applies a qualitative approach to collect data from various sources, including interviews with educators and human rights activists, as well as document analysis of relevant education policies in Papua.

Keywords: Citizenship Education, Human Rights, Papua.

Abstrak Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan elemen krusial guna mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab. Di Papua, di mana terdapat keragaman budaya dan tantangan sosial-politik yang kompleks, pengembangan hak asasi manusia (HAM) sering kali terhambat. Dalam konteks ini, PKn berfungsi sebagai fondasi yang dapat memperkuat pemahaman serta penghormatan terhadap HAM. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji signifikansi PKn di Papua, dengan menekankan dampaknya terhadap kesadaran HAM dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara kepada pendidik serta aktivis HAM, serta analisis dokumen kebijakan pendidikan yang relevan di Papua.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Papua.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, khususnya di Papua, mempunyai posisi yang krusial guna terciptanya masyarakat nasionalis dengan semangat patriotisme (Hasna 2021; Ratih & Najicha, 2021) dan berkarakter (Widiatmaka, 2016; Dewi, 2021). Dalam konteks Papua, yang dikenal dengan keragaman etnis dan budaya yang kaya, PKn tidak hanya berfungsi untuk menerangkan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan HAM (Herawati, 2022; Hermawan, 2022)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyatakan sekitar 25% populasi Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, selain dana otonomi, ada alokasi dana khusus untuk proyek infrastruktur (DTI) di Papua dan Papua Barat (Awom, 2021; Hasibuan, 2021). Hal tersebut menunjukkan jika perlunya adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Dengan pembelajaran Pkn yang baik, diharapkan masyarakat Papua dapat lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam konteks ini, PKn diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Banyak warga Papua yang merasa tidak diaggap keberadaannya

dalam hal penyampaian aspirasi, bahkan wawancara Kompas dengan Alissa Wahid (Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia) mengungkapkan bahwa saat ini orang Papua merasa nyawanya tidak dihargai (Kompas.com). Padahal, PKn yang efektif sebenarnya dapat membantu masyarakat memahami struktur pemerintahan, proses demokrasi, serta pentingnya partisipasi demi kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan menekankan pentingnya membangun karakter bangsa melalui pendidikan.

Namun, tantangan dalam implementasi PKn di Papua tidaklah sedikit. Ketimpangan akses pendidikan berkualitas masih terjadi, lebih khusus di wilayah pelosok. Menurut laporan UNICEF, pendidikan berkualitas belum dinikmati semua anak di Papua, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar peran mereka untuk negara. Karena itu, peningkatan mutu terkait pendidikan kewarganegaraan di tanah 1001 sungai adalah sebuah keharusan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus untuk mendalami signifikansi pendidikan kewarganegaraan di Papua. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 15 responden yang terdiri dari pendidik, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, analisis terhadap dokumen kebijakan pendidikan dan laporan-laporan terkait hak asasi manusia di Papua juga dilaksanakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memberikan kesempatan kepada responden untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam.

Dalam pengumpulan data, observasi langsung juga dilakukan peneliti pada beberapa sekolah di Papua untuk mengevaluasi cara PKn diajarkan. Hal ini penting untuk memahami konteks lokal serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan. Dengan menggunakan analisis tematik, penelitian ini bertujuan menggali makna tersembunyi dibalik data kualitatif yang diperoleh dari wawancara serta observasi, sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan bermakna.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PKn di Papua memiliki beragam hambatan, termasuk kurangnya sumber daya, minimnya pelatihan untuk guru, materi ajar yang relevan, rendahnya kesejahteraan guru (Alfasisromarapak, 2021). Namun, di sisi lain, terdapat juga inisiatif-inisiatif positif dari berbagai organisasi non-pemerintah yang

berupaya untuk meningkatkan PKn di daerah-daerah terpencil. Inisiatif ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, terdapat pula harapan untuk perbaikan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Papua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia. Mayoritas responden menyatakan bahwa melalui PKn, mereka mendapatkan pengetahuan mendalam terkait apa saja hak mereka sebagai penduduk negara Indonesia, serta cara mendapatkannya. Contoh, seorang guru di Jayapura mengungkapkan bahwa setelah mengajarkan materi tentang hak asasi manusia, banyak siswa yang mulai aktif berdiskusi mengenai isu-isu sosial di komunitas mereka.

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Beberapa responden menyampaikan bahwa meskipun mereka telah mengikuti PKn, banyak yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, terutama dalam konteks yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komperhensif, termasuk pelibatan masyarakat dalam proses pembelajaran merupakan hal yang harus diprioritaskan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik masih tergolong rendah. Meskipun PKn telah meningkatkan kesadaran, banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka merasa memiliki suara dalam proses demokrasi.

PKn di Papua berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, namun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Satu dari sekian tantangan yakni terjalnya jalan ke arah pendidikan yang bermutu, terutama di daerah terpencil. Laporan dari Human Rights Watch, akses pendidikan di Papua masih sangat terbatas, bahkan pendidikan tinggi hanya untuk sebagian kecil anak-anak. Hal ini berdampak pada pemahaman terkait apa yang harus mereka terima dan berikan selaku warga negara.

Pada konteks tersebut, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya peningkatan PKn. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat harus bersinergi demi tercapainya peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, program pelatihan untuk guru mengenai pendidikan kewarganegaraan berguna memperbaiki kualitas belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, materi ajar yang relevan dan kontekstual perlu

dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami beragam isu HAM yang ada di daerah mereka.

PKn juga harus diarahkan untuk meningkatkan respon mereka dalam hal penentuan keputusan. Masyarakat perlu diberikan ruang guna menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat.

4. SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Papua mengenai hak asasi manusia. Meskipun terdapat tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat memperdalam pemahaman masyarakat terhadap peran mereka dalam jalannya suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan kewarganegaraan, diharapkan masyarakat Papua dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di era otonomi khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 4(1), 141–153. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1870>
- Alissa Wahid: Saat ini orang Papua merasa nyawanya tidak dihargai. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/20401601/alissa-wahid-saat-ini-orang-papua-merasa-nyawanya-tidak-dihargai>
- Awom, S. B. (2021). Karakteristik kemiskinan di Provinsi Papua Barat setelah otonomi khusus. *JFRES Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 27–34.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kemiskinan di Papua*. Jakarta: BPS.
- Cenderawasih, U., & Abepura-Sentani, J. R. (2024). Penyuluhan dan penerapan sekolah damai untuk menumbuhkan sikap positif peserta didik. *Jurnal Abdi Pendidikan Program Kebinekaan Global*, 5(1), 29–39.

- Dewi, R. R., Suresman, E., & Suabuana, C. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di persekolahan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 2(1), 71–84.
- Gule, Y. (2021). Pentingnya kompetensi sosial guru pendidikan agama Kristen dalam meningkatkan motivasi siswa belajar pendidikan agama Kristen. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 5(1), 89–104.
- Hasibuan, S. N. (2021). Polemik pengelolaan dana alokasi khusus di Provinsi Papua. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 12–27.
- Hasna, S., Firdaus, A. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Strategi guru dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran PKN. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4970–4979.
- Herawati, R. T. (2022). Model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM pada mata pelajaran PKn siswa kelas XI di SMK N 4 Kota Serang tahun pelajaran 2022/2023. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 455–461.
- Hermawan, H. (2022). Implementasi “problem based learning” dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah HAM di mata pelajaran PPKN. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2875–2886.
- Human Rights Watch. (2020). *Papua: Education and human rights*.
- Irianto, P. (2024). Student overview of the Pancasila and citizenship education study program: Understanding Pancasila, social participation, and perception as agents of change. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(2), 367–386. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i2.8240>
- Jamal, O. (2020). The role of the Barisan Merah and Putih in fighting for legislative member for indigenous Papuans. *ACEH 2019*, 418, 214–221. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.042>
- Kogoya, W., Jamal, O., Krobo, A., Bengan, W., Keguruan, F., & Universitas, P. (2024). Penguatan karakter gotong royong bagi anak usia dini di PAUD Pelita Perumnas II Waena, Jayapura. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98–103.
- Materay, B. (2020). Pertumbuhan nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua 1963–1969. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 1–18.
- Meteray, B. (2022a). Klaim Kerajaan Majapahit dan penyemaian nasionalisme Indonesia di Kaimana. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1–15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5969.1-15>
- Meteray, B. (2022b). Kontestasi nasionalisme Indonesia pada tiga daerah penyemaian di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 48(1), 47–62.
- Pudjiastuti, S. R., Iriansyah, H. S., Idrus, A., Fatgehipon, A. H., & ... (2024). *Bunga rampai budaya demokrasi dalam perspektif kearifan lokal* (Issue June).

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/568910/bunga-rampai-budaya-demokrasi-dalam-perspektif-kearifan-lokal>

- Rahmadi, D. S., & Apriawan, A. (2019). Pembelajaran multikultural pada kuliah kewarganegaraan berbasis pendidikan tinggi vokasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3).
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan nusantara sebagai upaya membangun rasa dan sikap nasionalisme warga negara: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59–64.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan nusantara sebagai upaya membangun rasa dan sikap nasionalisme warga negara: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59–64.
- UNICEF. (2021). *Education in Papua: Challenges and opportunities*. Retrieved from [link].
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wabiser, Y. D. (2021). *Papua dari pemekaran ke pemekaran*. CV Widina Media Utama.
- Wabiser, Y. D., & Irianto, P. (2024). Problematics of students' discipline value in academic activities and non-academic. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(2), 355–366. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i2.8241>
- Wabiser, Y. D., & Meteray, B. (2023). The growth of Indonesian nationalism among Papuans after integration in Merauke (1963-1969). *Masyarakat Indonesia*, 35(August 1945), 246–266.
- Wabiser, Y. D., Prabawa, T. S., & Rupidara, N. S. (2022). The exploration of elementary school students' learning motivation: A case study in Papua. *Eurasian Journal of Educational Research*, 97(97), 59–85.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2), 188–198.
- Yayusman, M. S. (2019). Perkembangan studi diaspora. *Masyarakat Indonesia*, 45, 106–111.